

Government Spending, Unemployment, and Islamic Human Development Index: Evidence from Indonesia and Malaysia

Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Islamic Human Development Index: Bukti Empiris dari Indonesia dan Malaysia

Muhammad Fiqhi Tirtayudha¹ , Darwanto² 

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang,
Indonesia

tirtayudhafiqhi@gmail.com*, darwatomsiugm@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to analyse the effect of government spending and unemployment on the Islamic Human Development Index (IHDI) in Indonesia and Malaysia during the period 2013-2022. This study uses panel data regression method with Common Effect approach to test the relationship between these variables. The results of the analysis show that both government spending and unemployment have a negative and significant influence on the IHDI partially. This finding indicates that government spending, when not managed effectively, can actually hinder the achievement of human development goals in an Islamic perspective. Similarly, high levels of unemployment reduce the ability of individuals to fulfil basic needs which contributes to a decline in the quality of life and well-being of the society. In conclusion, more efficient budget management and unemployment reduction efforts are important factors in improving IHDI in Indonesia and Malaysia.

Keywords: Government expenditure, unemployment, IHDI, panel data

Article History

Received: 09-10-2024

Revised: 11-10-2025

Accepted: 12-10-2025

Published: 13-10-2025

^{*}Correspondence:

Muhammad Fiqhi Tirtayudha

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap Islamic Human Development Index (IHDI) di Indonesia dan Malaysia selama periode 2013-2022. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Common Effect untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah maupun pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHDI secara parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah ketika tidak dikelola dengan efektif, justru dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Demikian pula, tingginya tingkat pengangguran mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan upaya pengurangan pengangguran merupakan faktor penting dalam meningkatkan IHDI di Indonesia dan Malaysia.

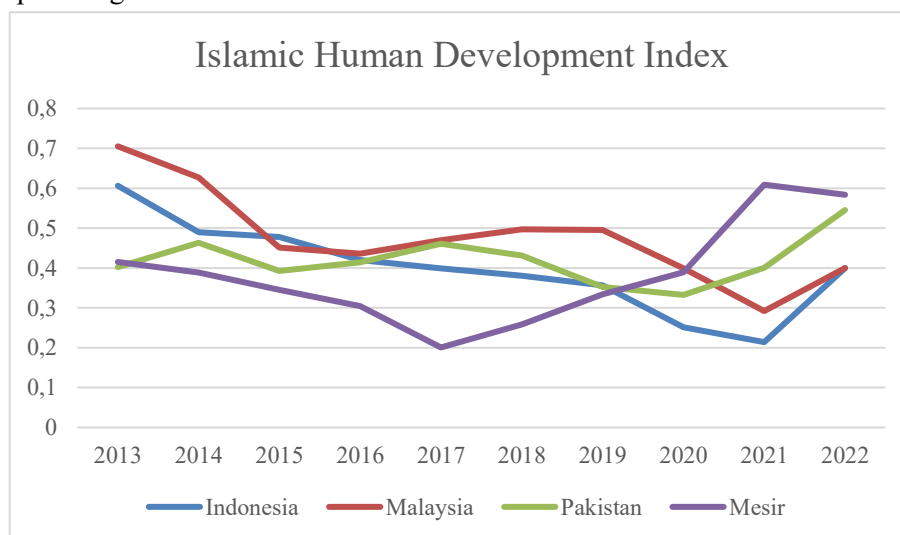
Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, pengangguran, IHDI, panel data

I. PENDAHULUAN

Pemikiran mengenai indikator keberhasilan pembangunan telah berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan produksi barang dan jasa. Seiring berjalannya waktu, muncul Indeks Kebahagiaan untuk mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat serta Human Development Index (HDI) yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan (Natadipurba, 2016). Human Development Index mencakup tiga dimensi utama. Pertama meliputi usia, umur panjang dan kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup yang diukur dari pengeluaran. Hingga saat ini, kualitas sumber daya manusia di hampir semua negara masih diukur menggunakan HDI yang telah dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP).

Bagolon & Comim (2008) menyatakan strategi pembangunan yang ada hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mempertimbangkan keberlangsungan potensi sumber daya alam dan kondisi lingkungan. Dalam konteks ini, HDI yang ditetapkan dapat menggambarkan keadaan pembangunan di berbagai negara, namun tidak sepenuhnya cocok untuk menilai pembangunan manusia menurut pandangan Islam, sebab HDI memiliki konsep yang tidak berdasarkan pada maqāsid al-shariah (MB Hendrie Anto, 2013). Untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dapat menggunakan alat ukur berupa Islamic Human Development Index (IHDI) yang dianggap lebih relevan (Rochmah & Sukmana, 2019).

IHDI dikemukakan oleh Anto untuk pertama kalinya sebagai suatu ukuran yang ditujukan guna menilai berhasilnya suatu pembangunan berdasarkan tujuan-tujuan utama dalam Islam. Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Anto (2017), menggunakan IHDI sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia pada beberapa negara dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Perhitungan IHDI didasarkan pada lima dimensi maqashid syariah, diantaranya "dimensi agama (ad-din), pikiran (al-aql), jiwa (an-nafs), warisan (an-nasl), dan kekayaan (al-maal)". Ibrahim & Asmak (2016) menyatakan bahwa tinggi dan meratanya suatu pencapaian I-HDI dapat terjadi bila negara mampu memfasilitasi pembangunan secara tepat dan baik, dengan memperhatikan semua aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas masyarakat. Diharapkan bahwa peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat akan berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan pembangunan manusia.



Sumber: *World Bank* (diolah)

Gambar 1. Perkembangan IHDI di Beberapa Negara Asia

Data menunjukkan bahwa terlihat adanya penurunan yang signifikan dalam IHDI untuk Indonesia dan Malaysia selama kurun waktu 2013 hingga 2022. Pada tahun 2013, IHDI Indonesia berada pada angka 0,61, sementara Malaysia memiliki nilai yang lebih tinggi, yaitu 0,70. Namun, pada tahun 2022, kedua negara mengalami penurunan yang cukup drastis, dengan nilai IHDI masing-masing turun menjadi 0,4. Kondisi ini berbanding terbalik dengan IHDI pada negara Pakistan dan Mesir yang notabene negaranya lebih kecil dibandingkan Indonesia dan Malaysia. Pada negara Pakistan dan Mesir menunjukkan angka IHDI mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai 2022. Oleh karena itu, penurunan IHDI pada negara Indonesia dan Malaysia mencerminkan tantangan yang dihadapi kedua negara dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masalah ini menjadi tantangan bersama yang harus diatasi oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di kedua negara guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan ini dan mengambil langkah-langkah strategis guna memperbaiki kondisi tersebut di masa mendatang.

Nilai IHDI ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran serta pengeluaran pemerintah. Pengangguran yang tinggi secara langsung berdampak negatif pada IHDI karena mengurangi pendapatan rumah tangga, menghambat akses terhadap pendidikan, dan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Ketika individu tidak memiliki pekerjaan, mereka sering kali mengalami kesulitan saat Mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti makan dan tempat tinggal dan

perawatan kesehatan. Akibatnya, kualitas hidup mereka menurun, dan partisipasi mereka dalam pembangunan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan ekonomi pun terpengaruh.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah memainkan peran krusial dalam mempengaruhi IHDI. Investasi pemerintah dalam sektor pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Pengeluaran yang memadai untuk pendidikan meningkatkan tingkat literasi dan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, alokasi dana yang cukup untuk layanan kesehatan akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka.

II. STUDI LITERATUR

Teori Pembangunan Islam

Konsep pembangunan ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang memengaruhi proses pembangunan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan sejumlah prinsip Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an serta hadis (Beik & Arsyianti, 2016). Pembangunan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang memenuhi berbagai nilai serta ajaran Islam. Choudury menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan ekonomi Islam, yaitu: tauhid, persaudaraan, kerja dan produktivitas, pemerataan distributif, kerjasama, dan organisasi atau lembaga Islam. Prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi. Islam mengakui adanya kepemilikan individu maupun kolektif, namun lebih menekankan pada distribusi kekayaan yang merata. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai regulator yang harus memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial (Ulum, 2015).

Menurut Ahmad dalam Septriani & Herianingrum (2017), terdapat empat pendekatan filosofis dasar yang berkembang dalam Islam: Tauhid, Rububbiyyah, Khilafah, dan Tazkiyah. Selain itu, terdapat lima karakteristik utama dalam konsep pembangunan Islam, yaitu sebagai berikut (Ramli et al., 2015):

1. Pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki sifat menyeluruh, mencakup aspek spiritual, serta berorientasi pada nilai-nilai moral dan material, sehingga kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat mampu tercapai.
2. Perluasan Pembangunan utamanya berfokus pada manusia beserta lingkungan budayanya.
3. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi, sehingga seluruh upaya wajib dilakukan secara seimbang tanpa menciptakan ketimpangan.
4. Pembangunan ekonomi memerlukan keseimbangan perubahan satu dengan yang lainnya secara kuantitatif maupun kualitatif.
5. Pembangunan dalam Islam mencakup prinsip penggunaan sumber daya secara optimal dan prinsip keadilan dalam distribusi.

Pendekatan ekonomi dalam pembangunan Islam haruslah komprehensif dan holistik, artinya perlu adanya keseimbangan antara aspek moral dan spiritual. Pembangunan ekonomi dalam Islam didasarkan pada tiga konsep utama: tauhid, kekhalifahan, dan tazkiyah (Beik & Arsyianti, 2016). Konsep tauhid sangat penting dalam Pembangunan, karena segala sesuatunya harus tunduk pada aturan Allah SWT. Selain itu, konsep kekhalifahan juga penting, sebab kualitas sumber daya manusia selaku hamba Allah serta wakil-Nya di planet ini sangat mempengaruhi Pembangunan untuk memakmurkannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam "Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31". Selanjutnya, konsep tazkiyah berlandaskan pada sejumlah prinsip yaitu "keadilan, keseimbangan, dan ketundukan penuh terhadap aturan Allah SWT", sehingga fokus pembangunan melibatkan seluruh aspek termasuk diantaranya aspek materi, moral serta spiritual. Untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh, diperlukan peran negara dan masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016).

Maqashid Syariah

Istilah 'maqashid syariah' secara bahasa terdiri atas dua komponen utama. 'Maqashid' artinya tujuan ataupun maksud, serta 'syariah' secara harfiah yaitu jalan menuju sumber air, namun dalam konteks agama mengacu pada sumber hukum Islam. Menurut (Muzlifah, 2013), "Jalan menuju sumber air ini juga dapat diartikan sebagai sumber kehidupan utama". Cakupan Maqashid Syariah relatif lebih luas dan ditujukan untuk kesejahteraan umat (Ullah & Kausar, 2017).

Maqashid syariah didasari oleh Al-Qur'an dan Hadits, di mana mazhab maqashid ini berhubungan erat dengan aspek hukum, khususnya dalam bidang muamalah yang banyak dikembangkan oleh para ulama. Salah satu ulama yang menonjol dalam mengembangkan prinsip-prinsip ini adalah Al-Syatibi, yang berupaya mengaitkan prinsip-prinsip dari kedua sumber ajaran Islam tersebut dengan mazhab maqashid. Pendekatan maqashid syariah ini memungkinkan studi hukum Islam lebih berfokus pada nilai-nilai yang membawa kesejahteraan bagi manusia dalam setiap perintah yang diwahyukan oleh Allah SWT (Aibak, 2015).

Maqashid syariah mencakup aspek yang luas dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat (Ullah & Kausar, 2017). Al-Ghazali menyatakan bahwasanya tujuan mazhab Maqashid syariah ialah "untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia melalui perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan atau keluarga (hifdz al-nasl), dan harta benda (hifdz al-mal)" (Kasri & Ahmed, 2015).

Tabel 1. Maqashid Syariah

Well-being	Dimensions	Dimensions Index	Indikator
Material Welfare Index (MWI)	Hifdzu al-Maal	Index al-Maal	1. Rasio Gini 2. Indeks Pengeluaran Perkapita
Non Material Welfare Index (MWI)	Hifdzu ad-Dien	Index ad-Dien	1. Tingkat Kejahatan 2. Tingkat Partisipasi Sekolah
	Hifdzu al-Aql	Index al-Aql	Tingkat Literasi Tahun Sekolah
	Hifdzu an-Nafs	Index an-Nafs	Angka Harapan Hidup
	Hifdzu an-nasl	Index an-nasl	1. Angka Kelahiran 2. Angka Kematian

Sementara itu, menurut Al-Syatibi dalam pandangan Sabar, et al. (2017), kelima mazhab syariah ini memiliki manfaat dan kepentingan yang berbeda dengan tiga tingkat urgensi, yaitu dharuriyyat (kebutuhan mendesak yang jika tidak terpenuhi dapat merusak kehidupan), hajjiyyat (kebutuhan yang penting untuk dipenuhi agar tidak menimbulkan kesulitan), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap yang bila tidak terpenuhi membuat kurangnya kenyamanan dalam hidup).

III. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data panel dengan kombinasi data time series dan cross section pada studi ini, di mana data diambil dari negara Indonesia dan Malaysia sebagai unit cross section dengan jangka waktu 2013-2022 sebagai data time series. Untuk menganalisis data, diterapkan analisis statistik deskriptif serta regresi data panel melalui penggunaan Program EViews pada studi ini (Winarno, 2011).

Bond (2002) & Drukker (2003) menyatakan bahwasanya "model Common Effect, fixed effect, serta Random Effect juga diterapkan pada analisis regresi data panel". Terdapat sejumlah tahapan uji guna menetapkan model yang paling tepat diantara ketiganya, yakni: 1) Uji Chow, ditujukan guna menilai apakah penggunaan model Common Effect lebih ideal dibanding dengan Fixed Effect. 2) Uji Lagrange Multiplier, ditujukan guna menilai apakah penggunaan model Common Effect lebih ideal dibandingkan dengan Random Effect. Sebelum melanjutkan, diperlukan adanya uji asumsi klasik, mencakup pengujian heteroskedastisitas serta autokorelasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Pengujian Data Panel

Pendekatan pada analisis model data panel terdiri atas 3 (tiga) jenis, diantaranya "pendekatan kuadrat terkecil (*Ordinary/ Pooled Least Square* atau *Common Effect*), pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*) dan pendekatan efek acak (*Random Effect*)", sebagai berikut:

Pengujian statistik yang merujuk pada pemilihan model dimulai dengan pengujian Chow guna menetapkan diantara *Pooled Least Square (Common Effect)* ataupun *Fixed Effect* sebagai model yang ideal pada regresi data panel. Apabila hasil pengujian Chow berupa nilai Probabilitas F.Stat yang melebihi $\alpha = 0,05$, maka artinya metode *Common Effect* dinyatakan signifikan dalam menilai data panel.

Sebaliknya, jika probabilitas F.Stat tidak melebihi $\alpha = 0,05$, maka artinya metode *Fixed Effect* yang dinyatakan signifikan.

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.690546	(1,16)	0.1205
Cross-section Chi-square	3.108582	1	0.0779

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9

Sebagaimana dengan hasil pada tabel tersebut, diketahui bahwasanya nilai Prob. Pengeluaran Pemerintah *Cross-section Chi-Square* mencapai 0,0779 dan melebihi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dinyatakan bahwasanya metode atau model yang terpilih yaitu metode *Common Effect*.

Apabila hasil pengujian *Chow* menunjukkan signifikansi, maka selanjutnya yaitu melakukan pengujian *Lagrange Multiplier* guna menetapkan metode yang paling ideal antara *Common Effect* dan *Random Effect*. Nilai *Both* melebihi 0.05 mengindikasikan "terpilihnya model *Common Effect*". Sebaliknya, nilai *Both* tidak melebihi 0.05 mengindikasikan "terpilihnya model *Random Effect*". Berikut hasil pengujian *Lagrange Multiplier* untuk seluruh sampel data:

Tabel 3. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.887219 (0.3462)	2.325606 (0.1273)	3.212825 (0.0731)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 9

Sebagaimana dengan hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwasanya nilai *Both* mencapai 0,0731 dan melebihi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwasanya model atau metode yang lebih ideal dalam uji data panel yaitu metode *Common Effect*.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Ghozali (2018) mendefinisikan analisis regresi linear berganda yaitu "metode analisis yang bertujuan untuk menilai seberapa kuat korelasi antara dua atau lebih variabel, serta mengidentifikasi arah korelasi antara variabel independen dan variabel dependen". Terlampir hasil Analisis regresi linear berganda dalam tabel seperti dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.247674	0.169326	7.368451	0.0000
PENGELUARAN PEMERINTAH	-0.001996	0.000507	-3.939233	0.0011
PENGANGGURAN	-0.092114	0.018645	-4.940307	0.0001
R-squared	0.594719	Mean dependent var		0.438361
Adjusted R-squared	0.547038	S.D. dependent var		0.119303
S.E. of regression	0.080294	Akaike info criterion		-2.068762
Sum squared resid	0.109601	Schwarz criterion		-1.919402
Log likelihood	23.68762	Hannan-Quinn criter.		-2.039605
F-statistic	12.47308	Durbin-Watson stat		1.174274
Prob(F-statistic)	0.000463			

Sumber: Output EViews 9

Sebagaimana dengan tabel tersebut, didapatkan suatu model regresi antara lain:

$$Y = 1.2476 - 0.001X_1 - 0.092X_2$$

Di mana :

Y = *Islamic Human Development Index*

X_1 = Pengeluaran Pemerintah

X_2 = Pengangguran

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap *Islamic Human Development Index*

Variabel pengeluaran pemerintah memperoleh nilai signifikansi mencapai 0.00011, yang tidak melebihi angka 0.05. Artinya, variabel pengeluaran pemerintah mempengaruhi variabel IHDI. Pada variabel pengeluaran pemerintah diperoleh koefisien regresi yaitu 0.001 serta negatif, yang mengindikasikan jika terjadi peningkatan pada variabel pengeluaran pemerintah secara signifikan sejumlah 1 satuan, maka akan terjadi penurunan nilai pada variabel *IHDI* mencapai 0.001. Oleh karena itu, H_1 : "variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap variabel *IHDI*" tidak dapat ditolak.

Di negara Indonesia, meskipun pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan serta kesehatan meningkat setiap tahun, efektivitasnya dalam meningkatkan *IHDI* masih dipertanyakan. Sebagaimana Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwasanya alokasi anggaran pendidikan meningkat rata-rata 15-20% per tahun selama periode 2013-2022. Namun, *IHDI* Indonesia mengalami penurunan, menjadi 0,4 pada tahun 2022 dari sebelumnya 0,7 pada tahun 2013. Fakta tersebut menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, di mana dana besar yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan berbasis Islam tidak sepenuhnya terealisasi. Pengeluaran yang tidak tepat sasaran, korupsi, dan kurangnya program-program yang sejalan dengan nilai-nilai Islam berkontribusi pada dampak negatif ini.

Malaysia menghadapi tantangan serupa. Pemerintah Malaysia juga meningkatkan pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan, dengan pertumbuhan anggaran rata-rata 10-15% per tahun selama periode 2013-2022. Namun, *IHDI* Malaysia malah mengalami penurunan menjadi 0,4 pada tahun 2022 dari sebelumnya 0,7 pada tahun 2013. Analisis menunjukkan bahwa meskipun Malaysia memiliki sistem pendidikan yang lebih terstruktur dibandingkan dengan Indonesia, masih ada masalah dalam distribusi dan penggunaan anggaran, seperti alokasi yang lebih besar untuk infrastruktur dibandingkan dengan pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kedua negara menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan *IHDI*. Pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada *Islamic Human Development Index* (*IHDI*) secara signifikan dan negatif jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran atau prioritas yang salah dalam penggunaan dana publik bisa menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan anggaran juga dapat mengurangi efektivitas pengeluaran pemerintah, yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan umum agar mengalami peningkatan. Akibatnya, ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran secara efisien dan adil dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, yang tercermin dalam penurunan nilai *IHDI*.

Korupsi menjadi salah satu faktor kunci yang memperburuk situasi ini. Ketika dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat disalahgunakan, efektivitas pengeluaran pemerintah berkurang drastis. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan umum dialihkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat tidak menerima manfaat yang layak dari anggaran yang telah disiapkan, dan kesenjangan sosial pun semakin melebar.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola pengeluaran secara efisien dan adil akan berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat. Hal ini tercermin dalam penurunan nilai *IHDI*, yang tidak hanya mengukur aspek materi seperti pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar yang memengaruhi kesejahteraan secara holistik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan dana publik dengan bijak, menghindari praktik korupsi, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Hanya

dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta tercermin dalam peningkatan IHDI.

Pengalokasian pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Ketika anggaran negara lebih banyak difokuskan pada sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur fisik atau subsidi yang tidak merata, kebutuhan dasar masyarakat yang paling rentan sering kali diabaikan. Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang layak, pendidikan yang merata, serta peluang ekonomi yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Tanpa perhatian yang cukup terhadap kebutuhan dasar ini, masalah kemiskinan akan terus berlanjut dan semakin sulit diatasi. Ketimpangan sosial pun akan semakin mencolok karena mereka yang berada di posisi rentan tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya yang seharusnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam konteks *Islamic Human Development Index*, yang mengukur kesejahteraan manusia berdasarkan perspektif Islam, aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial merupakan indikator penting. Ketika pengeluaran pemerintah tidak dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam memenuhi standar pendidikan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang merata, dan distribusi kekayaan yang adil, maka IHDI tidak akan meningkat secara signifikan. Dalam banyak kasus, dana yang dialokasikan untuk pembangunan manusia mungkin diarahkan pada proyek infrastruktur besar yang kurang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tidak berdampak pada peningkatan kualitas hidup yang diukur oleh IHDI.

Selain itu, pengeluaran pemerintah yang tidak seimbang juga dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang lebih besar, yang berdampak pada penurunan IHDI. Di Indonesia dan Malaysia, meskipun kedua negara telah menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan melalui berbagai program sosial dan subsidi, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kelompok masyarakat yang lebih kaya dengan yang miskin. Ketimpangan ini mengakibatkan pengeluaran besar yang diarahkan untuk kelompok-kelompok tertentu tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Dalam perspektif Islam, salah satu tujuan *maqashid syariah* adalah tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial yang merata, dan ketika hal ini tidak tercapai, maka pengeluaran pemerintah yang besar justru bisa memberikan dampak negatif terhadap pembangunan manusia dalam kerangka Islam.

Pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada sektor-sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur fisik atau subsidi yang tidak tepat sasaran, juga dapat mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang paling membutuhkan. Akibatnya, kemiskinan tetap ada, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan tetap tidak merata, serta ketimpangan sosial semakin meningkat. Semua ini berkontribusi pada rendahnya IHDI di kedua negara. Lebih jauh, jika proyek-proyek pemerintah lebih diarahkan pada pembangunan jangka pendek yang tidak berkelanjutan, maka hal ini hanya akan memperburuk keadaan dalam jangka panjang.

Jika proyek-proyek pemerintah lebih berfokus pada pembangunan jangka pendek yang tidak berkelanjutan, masalah ini hanya akan diperburuk di masa depan. Misalnya, pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang, seperti kerusakan lingkungan atau kesenjangan sosial, dapat menyebabkan masalah baru yang justru merugikan masyarakat di kemudian hari. Alih-alih memberikan solusi, proyek-proyek seperti ini hanya akan memperparah kondisi sosial dan ekonomi, serta menghambat upaya pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan keberlanjutan setiap program yang mereka laksanakan, memastikan bahwa pengeluaran diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Pengaruh Pengangguran terhadap *Islamic Human Development Index*

Variabel pengangguran memperoleh nilai signifikansi mencapai 0.0001 serta tidak melebihi angka 0.05. Maka artinya, variabel pengangguran berdampak pada variabel IHDI. Pada variabel pengangguran diperoleh koefisien regresi yaitu 0.092 serta negatif, yang mengindikasikan bahwa bila terjadi kenaikan pada variabel pengangguran secara signifikan sejumlah 1 poin, maka nilai pada *Islamic Human Development Index* akan menurun mencapai 0.092. Dengan demikian, H2 : "variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap IHDI" tidak dapat ditolak.

Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, memperlihatkan bahwasanya rata-rata tingkat pengangguran yakni sekitar 5% hingga 7% sepanjang periode 2013-2022. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran mencapai 7,07% sebab adanya pandemi COVID-19, sehingga turut menurunkan IHDI secara signifikan dari 0,35 pada 2019 menjadi 0,25 pada 2020. Pengangguran yang tinggi menyebabkan banyak keluarga kehilangan pendapatan, yang mengakibatkan penurunan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatnya kemiskinan. Ketidakstabilan ekonomi ini menghalangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga harta dan jiwa.

Di Malaysia, situasi serupa terjadi, meskipun dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Data dari Departemen Statistik Malaysia menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berkisar antara 2,8% hingga 4% selama periode 2013-2022, dengan lonjakan tajam pada tahun 2020 ketika tingkat pengangguran mencapai 4,5% akibat pandemi. Pada tahun tersebut, IHDI Malaysia turun dari 0,49 pada 2019 menjadi 0,39 pada 2020. Pengangguran menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan sosial, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal akses ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pengangguran berdampak pada *Islamic Human Development Index* (IHDI) secara signifikan dan negatif karena mencerminkan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingginya tingkat pengangguran mengurangi akses masyarakat atas pendapatan, dan berdampak pada keterbatasan kemampuan mereka untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, pengangguran dapat memicu masalah sosial seperti meningkatnya kemiskinan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial, yang semuanya berkontribusi pada penurunan IHDI. Dengan demikian, Dampak pengangguran tidak terbatas pada ekonomi, namun juga menyentuh dimensi-dimensi penting lainnya dalam pembangunan manusia sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Pengangguran mempengaruhi distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam perspektif Islam, menjaga harta (*hifz al-mal*) adalah salah satu tujuan utama *maqashid syariah*, yang berarti pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap kekayaan dan sumber daya ekonomi. Pengangguran menimbulkan kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan memperparah ketimpangan sosial, yang pada akhirnya merusak keadilan sosial yang diupayakan oleh *maqashid syariah*.

Dari perspektif Islam, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqashid syariah*, yang menekankan pentingnya memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai taraf hidup yang layak. Namun, pengangguran yang tinggi justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Pengangguran menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan, di mana sebagian kecil masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar lainnya terpinggirkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Ketimpangan yang diakibatkan oleh pengangguran ini semakin memperparah ketidakadilan sosial. Dalam *maqashid syariah*, keadilan sosial adalah fondasi penting bagi terciptanya harmoni dalam masyarakat. Ketika kesenjangan ekonomi meningkat, muncul kecemburuan sosial dan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, yang pada akhirnya dapat mengarah pada konflik dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial yang diidealkan dalam *maqashid syariah*, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi pengangguran. Ini termasuk menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan pelatihan keterampilan, serta memastikan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi. Dengan cara ini, distribusi kekayaan dapat lebih adil, dan keadilan sosial yang menjadi tujuan *maqashid syariah* dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pengangguran juga berdampak buruk pada akses terhadap pendidikan, yang merupakan indikator penting dalam IHDI. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, kemampuan mereka untuk membiayai pendidikan bagi diri sendiri atau anak-anak mereka menjadi terbatas. Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial. Di Indonesia

dan Malaysia, walaupun terdapat beberapa program pemerintah yang menyediakan pendidikan dasar secara gratis, biaya untuk pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan masih relatif tinggi. Akibatnya, keluarga yang terjebak dalam siklus pengangguran cenderung sulit memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Dalam perspektif Islam, menjaga akal (hifz al-'aql) adalah hal penting, yang mencakup pemberian pendidikan yang baik agar seseorang bisa mengembangkan potensi intelektual mereka. Pengangguran menghambat akses terhadap pendidikan dan pada akhirnya mengurangi kesempatan individu untuk berkembang secara intelektual dan spiritual, yang menyebabkan penurunan IHDI.

Lebih lanjut, pengangguran juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan memperburuk kondisi kejahatan dan ketidakstabilan sosial. Orang yang menganggur sering kali lebih rentan terhadap kejahatan dan kegiatan ilegal, seperti pencurian, perampokan, atau keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang merusak tatanan sosial. Dalam konteks Islam, stabilitas sosial dan keadilan sangat ditekankan, di mana setiap individu harus hidup dalam harmoni dan saling mendukung. Ketika pengangguran tinggi, tidak hanya menurunkan kesejahteraan individu tetapi juga merusak harmoni sosial dan rasa aman di masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan, sebagaimana diukur oleh IHDI.

Dari perspektif Islam, stabilitas sosial merupakan elemen penting yang harus dijaga oleh setiap individu dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Ketika angka pengangguran tinggi, keadilan sosial yang diidealkan dalam Islam menjadi sulit tercapai. Hal ini karena ketidakstabilan ekonomi tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga memicu ketegangan di antara anggota masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan yang pada akhirnya memicu konflik dan mengganggu harmoni dalam masyarakat.

Lebih lanjut, dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kedamaian dan rasa aman di lingkungan sekitarnya. Namun, dengan tingginya angka pengangguran, rasa aman ini semakin sulit terwujud. Pengangguran tidak hanya menurunkan kualitas hidup seseorang, tetapi juga merusak tatanan sosial secara keseluruhan. Ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan dapat menciptakan rasa putus asa, yang sering kali memicu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan dalam Islam. Akibatnya, kualitas hidup secara keseluruhan, yang dapat diukur melalui IHDI, cenderung menurun karena ketidakmampuan masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan keamanan.

V. KESIMPULAN

Pengeluaran pemerintah yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran serta tingginya tingkat pengangguran sama-sama memberikan pengaruh pada Islamic Human Development Index (IHDI) di Indonesia dan Malaysia secara signifikan dan negatif. Ketika pengelolaan anggaran pemerintah tidak efisien, hal ini dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara pengangguran mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua faktor ini bersama-sama dapat menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam penurunan nilai IHDI.

Untuk meningkatkan Islamic Human Development Index (IHDI) di Indonesia dan Malaysia, orientasi kebijakan terhadap optimalisasi pengeluaran pemerintah dan penurunan tingkat pengangguran sangat diperlukan. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran diperlukan untuk menghindari korupsi dan inefisiensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Lalu, untuk mengurangi pengangguran, pemerintah harus memperkuat program yang memadukan peningkatan keterampilan dengan penciptaan lapangan kerja.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi, M.F.T.; metodologi, M.F.T.; perangkat lunak, M.F.T.; validasi, M.F.T., dan D.; analisis formal, M.F.T.; investigasi, M.F.T.; sumber daya, M.F.T.; kurasi data, M.F.T.; penulisan – persiapan draf asli, M.F.T.; penulisan – tinjauan dan penyuntingan, M.F.T.; visualisasi, M.F.T.;

supervisi, D. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah yang dipublikasikan.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

PERNYATAAN PERSETUJUAN YANG DIINFORMASIKAN

Tidak berlaku.

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis korespondensi [M.F.T].

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darwanto atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, M. B. H. (2013). Introducing an *Islamic Human Development Index* (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, 19(2), 69–95.
- Bagolin, I. P., & Comim, F. V. (2008). Human Development Index (HDI) and its family of indexes : an evolving critical review. *Revista de Economia*, 34(2), 7–28.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bond, S. R. (2002). Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice. *Portuguese Economic Journal*, 1(141–162).
- BPS. (2018, Oktober 29). *indeks pembangunan manusia*. Retrieved <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks pembangunan manusia.html#subjekViewTab1>
- Fauzi, Y. (2018, Oktober 29). *ranking indeks pembangunan indonesia turun ke 113*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>
- Kasri, R., & Ahmed, H. (2015). Assessing Socio-Economic Development based on Maqāṣid al-Sharī'ah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 23(1), 77.
- Khasanah, K. (2015). Hukum Ekonomi Syari'ah, Indeks Pembangunan Manusia dan Kapitalisme Global (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam). *Al-Manahij*.
- Koyimah, I., Jajang, A., Mahri, W., & Nurasyiah, A. (2020). Analysis Of Human Development With The *Islamic Human Development Index* (IHDI) In West Java Province In 2014-2018.
- Lind, N. C. (1992). Some thoughts on the human development index. *Social Indicators Research*, 27(1), 89–101. <https://doi.org/10.1007/BF00300511>
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 177–183.
- Natadipurba, C. (2016). *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
- Oladapo, I. A., & Rahman, A. A. (2016). Maqasid Shari'ah: The Drive for an Inclusive Human Development Policy. *Jurnal Syariah*, 24(2), 287–302.
- Pratowo, N. I. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 15–31.
- Ramli, R. M., Ismail, A. G., & Tasrif, M. (2015). M-Dex among the Islamic Countries. *Policy*

- Roundtable Discussion on Maqasid Shariah (p. 10)*. Malaysia: International Research Centre of Economic and Finance.
- Rochmah, S., & Sukmana, R. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi Terhadap *Islamic Human Development Index* (Ihdi) Di Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(4).
- Sabar, Z., Hamzah, M. Z., & Basri, Y. B. (2017). Analisis Dampak Maqashid Syariah Terhadap Indeks Pembangunan. *Al-awqaf*, 188-189.
- Septriani, M. M., & Herianingrum, S. (2017). Analisis IHDI (Islamic-Human Development Index) di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 381-395.
- Subandi. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Ullah, S., & Kausar, A. (2017). Maqasid-al-Shariah-based socio-economic development index (SCECDI): The case of some selected Islamic economies. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 5(3), 32–44.
- Ulum, F. (2015). *Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Merata*. *Tsaqafah*, 118- 119.
- Winarno, W. W. (2011). *Aplikasi Ekonometrika dan Statistika dengan EViews (3rd ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yusuf, M. Y. (2019, Maret 22). Pembangunan dalam Perspektif Islam. Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam>